

**DISSENTING OPINION ITSBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH
(STUDI KASUS TERHADAP PERKARA NOMOR 455/PDT.G/2016/PA.PYK)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum Pada
Jurusan Hukum Keluarga



**WINI TITRIA SUNITA
1313010411**

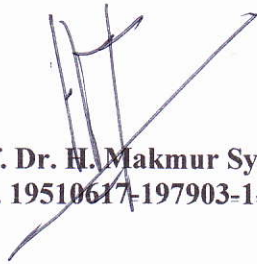
**UIN IMAM BONJOL
PADANG**
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) IMAM BONJOL
PADANG
1439 H/ 2018 M

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama: **WINI TITRIA SUNITA BP. 131301010411** dengan judul skripsi :” **Dissenting Opinion Pengesahan Itsbat Nikah Yang Mempunyai Halangan Pernikahan di Pengadilan Agama Payakumbuh (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor 455/Pdt.G/2016/Pa.Pyk)**”. memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan kesidang munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk digunakan seperlunya.

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Makmur Syarif.,SH.M.Ag
NIP. 19510617-197903-1-003

Pembimbing II



Nurhasnah M.Ag
NIP. 197200707-199703-2002

ABSTRAK

Wini Titria Sunita, Bp 1313010411 dengan judul skripsi: “**Dissenting Opinion Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Payakumbuh (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor 455/Pdt.G/2016/Pa.Pyk)**”.Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II melawan Termohon. Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan *itsbat* nikah guna untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya. Namun Termohon keberatan jika Pengadilan Agama Payakumbuh menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II. Karena pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung, Pemohon I masih mempunyai ikatan perkawinan dengan Termohon, dan tidak meminta izin kepada Termohon serta tidak mengajukan surat izin poligami ke Pengadilan Agama di daerahnya. Dengan permasalahan ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan dalil-dalil dan bukti surat serta saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Namun ada perbedaan pendapat hakim (*dissenting opinion*) menyatakan bahwa Permohonan itu harus ditolak karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rumusan masalah dari skripsi ini adalah apa penyebab perbedaan pendapat hakim (*dissenting Opinion*) dalam memutuskan perkara *itsbat* nikah ini dan Bagaimana penerapan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia terhadap putusan perkara nomor 455/Pdt.G/2016/Pa.Pyk. Menjawab persoalan ini, penulis menggunakan penelitian *library research* (studi kepustakaan) karena titik fokus utama adalah penetapan hukum dalam perkara ini dan dibantu dengan *field research* penelitian lapangan untuk analisis dan penyajian data secara objektif guna memecahkan permasalahan secara langsung turun kelapangan yang menjadi tempat penelitian. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, bahwa dapat disimpulkan penyebab perbedaan pendapat hakim adalah perbedaan dalam penafsiran hukum dalam memutus perkara, alasan hakim berbeda pendapat (*Dissenting Opinion*) karena putusan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan demi meniadakan kemudharatan dan keadilan atas kepastian hukum bagi anak-anak telah ada aturan perundang-undangan yang berlaku untuk perlindungan identitas anak. Tinjauan hukum perkawinan Islam di Indonesia terhadap perkara pengesahan nikah tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur. Berdasarkan hal tersebut menurut penulis putusan Majelis Hakim terhadap perkara Nomor 455/Pdt.G/2016/Pa.pyk tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan permohonan tersebut semestinya ditolak berdasarkan perbedaan pendapat hakim (*dissenting opinion*) yang menolak.

ABSTRACT

Wini Titria Sunita, Bp 1313010411 with the title of thesis: **"Dissenting Opbation Itsbat Marriage in Religious Courts Payakumbuh (Case Study Tarhadap Case Number 455 / Pdt.G / 2016 / Pa.Pyk)"** Writing this thesis background by the petition filed by the applicant I and Petitioner II against the Respondent. Petitioner I and Petitioner II apply for marriage marriage in order to take care of the child's birth certificate and other purposes. However, the Respondent objected if the Religious Courts of Payakumbuh established the legal marriage of Petitioner I with Petitioner II. Because at the time of marriage between Petitioner I and Petitioner II takes place, Petitioner I still has marital ties with the Respondent, and does not ask permission to the Respondent and does not file a polygamy license to the Religious Courts in his area. With this matter the Panel of Judges of Religious Court Payakumbuh grant the petition of Petitioner I and Petitioner II based on the arguments and evidence of the letter and witnesses filed by Petitioner I and Petitioner II. But there is a difference of opinion of the judge (dissenting opinion) states that the Application must be rejected because it is not in accordance with the legislation. The formulation of the problem of this thesis is what causes the dissenting opinion of the judge (dissenting Opinion) in deciding this marriage matter marriage and How the review of Islamic Marriage Law in Indonesia against the verdict of the case number 455 / Pdt.G / 2016 / Pa.Pyk. In covering this problem, the author uses the type of research library research (library study) because the main focus point is the determination of the law in this case and assisted with field research (field research) for analysis and presentation of data objectively to solve a problem in the space that became place of study. Based on the research that the authors do, that can be concluded the cause of differences of opinion judge is the difference in the interpretation of the law in deciding the case, the reason the judge dissenting opinion (Dissenting Opinion) because the decision is not in accordance with legislation and for seeking *keadilan* and justice for legal certainty for children have existing laws and regulations that apply to child identity protection. The review of Islamic marriage law in Indonesia to the marriage legalization is not in accordance with the laws and regulations governing it. Based on that, according to the author of the judge decision on the case number 455 / Pdt.G / 2016 / Pa.pyk not in accordance with the laws and regulations, the petition should be rejected based on dissenting opinion dissenting opinion.